

**LAPORAN**

**AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH**

**LAKIP**



**DINAS PERIKANAN**  
**KABUPATEN JEMBER 2024**



## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga tugas penyusunan Laporan Kinerja Dinas Perikanan Tahun 2024 dapat kami selesaikan.

Laporan Kinerja Dinas Perikanan Tahun 2024 disusun sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Dinas Perikanan Tahun 2024 ini merupakan wujud pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian sasaran strategis Tahun Anggaran 2024. Laporan Kinerja Dinas Perikanan Tahun 2024 berfungsi sebagai alat penilaian kinerja dan wujud transparansi serta pertanggungjawaban kepada masyarakat serta dapat berfungsi sebagai instrument pengendali peningkatan kinerja unit kerja di Dinas Perikanan. Kinerja Dinas Perikanan diukur atas dasar penilaian Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai indikator keberhasilan pencapaian sasaran strategis yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Dinas Perikanan Tahun 2024.

Akhir kata, kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, bantuan serta partisipasi dalam penyusunan Laporan Kinerja Dinas Perikanan Tahun 2024.

22 Januari 2025

Kepala Dinas Perikanan  
Kabupaten Jember



Indra Tri Purnomo, S.Stp, M.Si  
Pembina Tingkat I / IV-b  
NIP. 19790619 199912 1 001



## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	ii
IKHTISAR EKSEKUTIF.....	iv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. LATAR BELAKANG.....	1
B. MAKSUD DAN TUJUAN.....	2
C. KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, DAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS PERIKANAN.....	2
D. SUMBER DAYA MANUSIA DINAS PERIKANAN .....	8
E. SARANA PRASARANA DINAS PERIKANAN KABUPATEN JEMBER ...	9
F. ANGGARAN DINAS PERIKANAN KABUPATEN JEMBER .....	10
G. ISU STRATEGIS .....	13
BAB II. PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA.....	15
A. RENCANA STRATEGIS.....	15
B. RENCANA KINERJA TAHUNAN .....	17
C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024.....	20
D. ALOKASI ANGGARAN PER SASARAN TAHUN 2024 .....	23
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA .....	25
A. KERANGKA PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2024 .....	25
B. CAPAIAN KINERJA DINAS PERIKANAN .....	26
C. ANALISIS PROGRAM KEGIATAN YANG MENDUKUNG SASARAN ....	33
D. ANALISIS ATAS EFISIENSI SUMBER DAYA .....	43
E. EVALUASI DAN ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN DAN KEGAGALAN .....	44
F. REALISASI ANGGARAN .....	50
BAB IV. PENUTUP .....	54



## **LAMPIRAN**

**Lampiran 1. SK IKU OPD**

**Lampiran 2. Perjanjian Kinerja Tahun 2024**

**Lampiran 3. Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2024**

**Lampiran 4. Matriks Rencana Strategis (Renstra) 2021-2026**

**Lampiran 5. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2024**

**Lampiran 6. Cascading 2024**



## IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Dinas Perikanan disusun berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja. Laporan Kinerja Dinas Perikanan tahun 2024 merupakan laporan kinerja atas target kinerja yang tercantum dalam Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perikanan Tahun 2021-2026 dan dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Dinas Perikanan Tahun 2024.

Tujuan yang merupakan kondisi yang diharapkan dapat diwujudkan dalam jangka waktu paling lambat dalam periode s.d tahun 2026, yang meliputi:

1. Produksi Perikanan Tangkap, Budidaya dan Olahan Perikanan semakin meningkat jumlah dan kualitasnya;
2. Pelaku usaha perikanan bisa berdaya dan mandiri;
3. Pembudidaya ikan dapat membuat pakan ikan mandiri tanpa bergantung pakan pabrikan yang semakin mahal harganya;
4. Nelayan semakin berjaya dan tidak lagi bergantung kepada pengambang;
5. Pengolah dan Pemasar Ikan semakin berkembang inovasi dan kreasinya dalam meningkatkan kualitas dan variasi olahan ikan dan juga kemasannya.

Capaian kinerja sasaran tahun 2024 yang merupakan capaian kinerja dari pengukuran IKU atau Indikator Kinerja Sasaran dari Renstra Dinas Perikanan tahun 2021-2026, dapat diuraikan sebagai berikut :

Sasaran : Meningkatnya Produksi Perikanan dengan dua Indikator Sasaran yaitu Persentase peningkatan produksi perikanan tangkap mendapat predikat nilai Sangat Memuaskan. Hal ini dapat dilihat dari pengukuran indikator sasaran, dengan capaian 96% (menggunakan data statistik Tangkap Dinas Perikanan tahun 2024). Dan Persentase peningkatan produksi perikanan budidaya mendapatkan predikat nilai Sangat Baik. Hal ini juga bisa dilihat dari pengukuran indikator sasaran, dengan capaian 100%. (menggunakan data statistik Budidaya



Dinas Perikanan tahun 2024). Sedangkan untuk sasaran yang ke dua yaitu Meningkatnya Produksi Olahan Perikanan dengan sasaran indikator Persentase produk olahan perikanan yang bersertifikat mendapat predikat nilai Memuaskan. Hal ini bisa dilihat dari pengukuran indikator sasaran, dengan capaian 99%.

Dari uraian capaian indikator dapat disimpulkan bahwa target dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat oleh Dinas Perikanan telah dilaksanakan dengan baik dimana sebanyak 3 indikator sasaran mendapat kategori Sangat Memuaskan.

Untuk mendukung pencapaian kinerja tahun 2024 dilaksanakan berbagai program dan kegiatan dengan mengalokasikan dana dalam APBD Tahun Anggaran 2024 yaitu 100% merupakan Belanja Operasional sebesar Rp 9.866.537.304.

Sedangkan realisasi belanja sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar Rp 8.477.267.467 atau 86% dari pagu anggaran. Realisasi sampai dengan 31 Desember 2024 yang disampaikan di bawah ini merupakan data sementara dan belum diaudit oleh BPK. Dari analisis yang dilakukan ada efisiensi dalam penggunaan anggaran untuk pencapaian kinerja yang disebabkan oleh adanya penanggulangan dampak inflasi daerah yang terjadi di Kabupaten Jember.

Kendala atau hambatan yang dihadapi dalam pelaporan dan pengukuran target-target sasaran yang telah ditetapkan dalam tahun 2024 antara lain :

1. Terbatasnya jumlah SDM pada Dinas Perikanan.
2. Pengukuran data produksi perikanan dan budidaya yang masih manual.
3. Penangkapan ikan yang masih tergantung dengan musim dan cuaca.
4. Luas lahan budidaya dan teknologi budidaya yang masih konvensional.



Beberapa rekomendasi perbaikan dalam meningkatkan pencapaian kinerja di tahun 2024 antara lain :

1. Mengoptimalkan sumber daya yang ada untuk meningkatkan kualitas pendataan.
2. Menambah SDM yang memiliki kompetensi teknis maupun pengelolaan keuangan.
3. Pembuatan aplikasi untuk data statistik perikanan tangkap maupun budidaya sehingga data bisa up to date dan real time.
4. Melakukan pembinaan dan pelatihan terkait CBIB.



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. LATAR BELAKANG**

Terselenggaranya *Good Governance* merupakan persyaratan bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan serta cita-cita bangsa bernegara. Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan penerapan system pertanggungjawaban yang tepat, jelas, dan terukur sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Upaya pembangunan tersebut sejalan dengan TAP MPR RI. No. XI / MPR / 1998 tentang penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme disebutkan salah satu asas tertib penyelenggaraan negara adalah asas akuntabilitas yaitu asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Laporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas yang berfungsi antara lain sebagai alat penilaian kinerja, wujud akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi dan wujud transparansi serta pertanggungjawaban kepada masyarakat serta merupakan alat kendali dan alat pemacu peningkatan kinerja setiap unit di Lingkungan Perangkat Daerah.

Kinerja Dinas Perikanan diukur atas dasar penilaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang merupakan indikator keberhasilan pencapaian sasaran



strategis sebagaimana telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja Dinas Perikanan Kabupaten Jember tahun 2024

## **B. MAKSUD DAN TUJUAN**

Penyusunan Laporan Kinerja Dinas Perikanan Kabupaten Jember dimaksudkan untuk memberikan informasi kinerja yang terukur atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai dalam satu tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan

Tujuan penyusunan Laporan kinerja Dinas Perikanan Kabupaten Jember adalah

- Sebagai sarana pertanggungjawaban kinerja kepada seluruh stakeholder atas pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang pengelolaan sumber daya yang menjadi kewenangan Dinas Perikanan Kabupaten Jember
- Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan untuk meningkatkan kinerja instansi

## **C. KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS PERIKANAN**

Kedudukan, tugas, fungsi dan susunan organisasi Dinas Perikanan Kabupaten Jember diatur dalam Peraturan Bupati Jember Nomor 11 tahun 2023 sebagai berikut :

- 1) Dinas merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.
- 2) Dinas dipimpin oleh kepala dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- 3) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang kelautan dan perikanan.



- 4) Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyelenggarakan fungsi:
  - a. Perumusan kebijakan daerah di bidang kelautan dan perikanan;
  - b. Pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kelautan dan perikanan;
  - c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan daerah di bidang kelautan dan perikanan;
  - d. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang kelautan dan perikanan; dan
  - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 5) Susunan organisasi Dinas Perikanan Kabupaten Jember terdiri dari :
  - a. Kepala Dinas
  - b. Sekretariat, membawahi  
Sekretariat sebagaimana dimaksud mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perencanaan pelaporan dan keuangan serta tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.  
Untuk Melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Sekretariat mempunyai fungsi:
    - a) Penyiapan perumusan kebijakan operasional tugas dan dukungan administrasi umum, kepegawaian, perencanaan dan keuangan di lingkungan Dinas;
    - b) Pengkoordinasian pelaksanaan tugas dan dukungan administrasi umum, kepegawaian, perencanaan pelaporan dan Keuangan di lingkungan dinas;
    - c) Pemantauan evaluasi, pelaporan tugas dan dukungan administrasi umum, kepegawaian, perencanaan pelaporan dan keuangan di Lingkungan Dinas;
    - d) Pengkoordinasian pengelolaan barang milik daerah dan barang milik negara yang menjadi tanggungjawab Dinas; dan
    - e) Penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.



1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud, mempunyai tugas:

- a) Menyiapkan administrasi surat yang meliputi penerimaan, pengiriman dan pendistribusian surat;
- b) Menyiapkan bahan pengadaan naskah dinas dan pengelolaan kearsipan Dinas;
- c) Menyiapkan bahan penyelenggaraan rapat-rapat dinas, perjalanan dinas, penerimaan tamu-tamu, keamanan dan kebersihan lingkungan Dinas serta pelayanan kerumahtanggaan lainnya;
- d) Menyiapkan bahan telaahan dan pelayanan informasi;
- e) Menyiapkan dan mengkoordinasikan penyusunan analisis jabatan dan analisis beban kerja di lingkungan Dinas;
- f) Menyusun rencana kebutuhan barang dan kebutuhan pemeliharaan barang;
- g) Melaksanakan pelayanan administrasi dan melaksanakan pengadaan, pemeliharaan dan pendistribusian peralatan/perlengkapan kantor;
- h) Melaksanakan kegiatan penatausahaan, pengamanan dan perlindungan aset/barang milik daerah;
- i) Melaksanakan pengusulan seluruh rencana kebutuhan kepegawaian dan penyelenggaraan tata usaha kepegawaian lainnya;
- j) Menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas; dan
- k) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh sekretaris.

2. Kelompok Jabatan Fungsional.

- c. Bidang Perikanan Tangkap dan Sumberdaya Perikanan, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional, mempunyai tugas melaksanakan



penyiapan koordinasi, fasilitasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan capaian Indikator Kinerja Bidang Perikanan Tangkap dan Sumberdaya Perikanan serta tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas. Untuk melaksanakan tugas yang dimaksud Bidang Perikanan Tangkap dan Sumberdaya Perikanan mempunyai fungsi meliputi:

- a) Penyusunan rencana peningkatan produksi perikanan tangkap;
  - b) Pengumpulan data dan sasaran kebijakan dalam upaya peningkatan produksi perikanan tangkap;
  - c) Pelaksanaan penyiapan pemberdayaan nelayan kecil;
  - d) Penyusunan kebijakan penyebaran informasi teknologi produksi perikanan tangkap
  - e) Penyusunan Kebijakan Fasilitasi penyediaan Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap
  - f) Penyusunan kebijakan, pengelolaan dan penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)
  - g) Penyusunan kebijakan peningkatan kelas kelompok usaha bersama (KUB)
  - h) Penyediaan data dan sasaran kebijakan dalam upaya peningkatan Sumberdaya perikanan dan perairan umum daratan;
  - i) Pengelolaan, pengembangan, pengawasan dan pengendalian Sumberdaya Perikanan yang menjadi kewenangan kabupaten;
  - j) Pelaksanaan pembinaan penyiapan dan pemberdayaan kelompok masyarakat pengawas (POKMASWAS)
  - k) Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan capaian kinerja bidang; dan
  - l) Pelaksanaan Tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas;
- d. Bidang Perikanan Budidaya dan Pasca Panen, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional; mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi, fasilitasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi



serta pelaporan capaian Indikator Kinerja Bidang yang tertuang dalam Rencana Strategis serta tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas. Untuk melaksanakan tugas yang dimaksud, Bidang Perikanan Budidaya dan Pasca Panen mempunyai fungsi meliputi;

- a) Pelaksanaan penyiapan pembudidaya ikan kecil;
- b) Pelaksanaan penetapan persyaratan dan prosedur, pelayanan penerbitan rekomendasi izin usaha di Bidang pembudidayaan Ikan yang usahanya, lokasi, dan/atau manfaat atau dampak negatifnya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten yang menggunakan Teknologi Sederhana, semi Intensif, dan Intensif, serta Tidak Menggunakan Modal Asing;
- c) Pelaksanaan penetapan persyaratan dan prosedur, pelayanan penerbitan rekomendasi perizinan berusaha skala mikro dan kecil bagi pembudi daya ikan kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten;
- d) Pelaksanaan penyiapan rekomendasi penerbitan tanda pencatatan usaha pembudidayaan ikan (TPUPI)
- e) Pengembangan dan fasilitasi sarana dan prasarana kegiatan budidaya ikan;
- f) Penyusunan kebijakan penyebaran informasi pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan budidaya;
- g) Monitoring dan pengendalian pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan budidaya perikanan;
- h) Pengembangan dan fasilitasi sarana dan prasarana kegiatan perbenihan dan calon induk unggul;
- i) Penyusunan rencana peningkatan kelas kelompok pembudidaya ikan (POKDAKAN);
- j) Perencanaan, pengembangan, pemanfaatan dan perlindungan lahan untuk pembudidayaan ikan di darat;
- k) Perencanaan, dan pengembangan pemanfaatam air untuk pembudidayaan ikan di darat;



- l) Penyediaan data dan informasi usaha pemasaran dan pengolahan hasil perikanan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten;
  - m) Fasilitasi peningkatan ketersediaan ikan untuk konsumsi dan usaha pengolahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten;
  - n) Pembinaan mutu dan keamanan hasil perikanan, penyusunan rencana peningkatan produksi bagi usaha pengolahan dan pemasaran Skala Mikro dan Kecil;
  - o) Penyusunan kebijakan peningkatan kelas kelompok pengolah dan pemasar (POKLAHSAR)
  - p) Pengembangan dan fasilitasi sarana dan prasarana kelompok pengolah dan pemasar serta UMKM Produk Perikanan;
  - q) Penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas termasuk capaian indicator kinerja bidang; dan
  - r) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
- e. UPTD; dan
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- 6) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- 7) Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- 8) Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
- Unit Pelaksana Teknis Daerah dibawah kewenangan Dinas Perikanan terdiri dari :
- a. UPTD Pelelangan Ikan, bertempat di Desa Puger Kulon Kecamatan Puger mempunyai tugas membantu pelaksanaan sebagian tugas dinas.
  - b. UPTD PBAT (Perikanan Budidaya Air Tawar) Rambigundam, bertempat di Jalan Argopuro Nomor 224 Dusun Krajan Lor Desa Rambigundam



Kecamatan Rambipuji mempunyai tugas membantu pelaksanaan sebagian tugas dinas.

#### D. SUMBER DAYA MANUSIA DINAS PERIKANAN

Sumber Daya Manusia merupakan salah satu instrumen penunjang pokok pelaksanaan tugas pokok dan fungsi instansi dengan kuantitas dan kualitas yang memadai sesuai analisa jabatan dan kompetensi. Berdasarkan hasil analisa jabatan kebutuhan pegawai Dinas Perikanan Kabupaten Jember yang dituangkan pada Keputusan Bupati Jember Nomor: 188.45/239/1.12/2024 tentang Peta Jabatan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jember. Jumlah personil Dinas Perikanan Kabupaten Jember yang ada per 31 Desember 2024 berdasarkan keterisian pegawai yang datanya sudah diupdate melalui SIMPEG sebanyak 63 orang, dengan rincian PNS sebanyak 31 Orang, PPPK 2 Orang dan Non ASN sebanyak 30 Orang. sedangkan berdasarkan hasil analisa jabatan dan analisa beban kerja idealnya sebanyak 112 orang, sehingga masih terdapat kekurangan pegawai ASN sebanyak 79 orang atau 63,04%.

Komposisi pegawai keseluruhan adalah sebagai berikut:

**Tabel 1.1**  
**Komposisi Pegawai Dinas Perikanan Kabupaten Jember Tahun 2024**

Jabatan	Kebutuhan					Bezetting/ Pegawai Yang Ada						L	P
	Σ	SMA	D3	S1	S2	Σ	SMP	SMA	D3	S1	S2		
Jabatan Pimpinan Tinggi	2				2	1					1	1	
Jabatan Administrasi	0					0							
1. Administrator	3	0	0	3		2				2		2	
2. Pengawas	3	0	0	3		1				1		1	
3. Pelaksana	65	46	8	11		23		18		5		21	2
Jabatan Fungsional	39	20	2	13	4	6				6		3	3
Non ASN						30		8	19	3		29	1
Jumlah	112	66	10	30	6	63		26	19	17	1	57	6

**Sumber** : Data Kepegawaian Dinas Perikanan Kabupaten Jember 2024



Berdasarkan tabel 1.4, menunjukkan adanya gap antara kebutuhan pegawai dari hasil analisis jabatan dengan bezetting pegawai. Jumlah total pegawai ASN dan Non ASN 63 Dinas Perikanan belum memenuhi jumlah ideal untuk pengelolaan beban kerja di Dinas Perikanan Kabupaten Jember.

#### E. SARANA PRASARANA DINAS PERIKANAN KABUPATEN JEMBER

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi selain penguatan pada sumber daya manusia, juga diperlukan dukungan sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana yang memadai akan menunjang keberhasilan ketercapaian tugas pokok dan fungsi Institusi. Dinas Perikanan Kabupaten Jember menempati gedung di Jl. Letjen Suprpto Nomor 139, Sumpalsari, Kabupaten Jember.

Sebagai penunjang penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang semakin meningkat, maka gedung Dinas Perikanan Kabupaten Jember kurang memadai, karena ketidaksesuaian ruang seperti tidak adanya papan nama dinas, tata letak ruang yang kurang efisien karena terlalu sempit, sehingga tidak dapat mengakomodasi kinerja karyawan dalam pelayanan publik dengan optimal dan efektif. tata letak ruang resepsionis yang kurang terorganisasi karena tidak ada pemisahan antara area resepsionis dan ruang tunggu, tidak adanya gedung arsip untuk penyimpanan berkas dan ruang stok opname yang memadai. Adapun data sarana dan prasarana pada Dinas Perikanan Kabupaten Jember adalah sebagai berikut :

**Tabel 1.2**  
**Profil Sarana dan Prasarana Dinas Perikanan Kabupaten Jember**  
**Per 31 Desember 2024**

No	Sarana Prasarana	Jumlah	Kondisi	Jumlah ideal
1	Tanah	8	Baik	8
	Tanah Persil	4	Baik	5
	Tanah Lapangan	4	Baik	4
2	Peralatan dan Mesin	1.292	Baik	1.292
	Alat Besar	15	Baik	15
	Alat Angkutan	25	Baik	25
	Alat Bengkel dan Alat Ukur	68	Baik	68



No	Sarana Prasarana	Jumlah	Kondisi	Jumlah ideal
	Alat Pertanian	561	Baik	561
	Alat Kantor dan Rumah Tangga	447	Baik	447
	Alat Studio, Komunimasi dan Pemancar	29	Baik	29
	Alat Laboratorium	9	Baik	9
	Alat Persenjataan	59	Baik	59
	Komputer	79	Baik	79
3	Gedung dan Bangunan	40	Baik	42
	Bangunan Gedung Tempat Kerja	39	Baik	39
	Bangunan Gedung Tempat Tinggal	1	Baik	1
4	Jalan Irigasi dan Jaringan	19	Baik	19
	Jalan dan Jembatan	5	Baik	5
	Bangunan Air	7	Baik	7
	Instalasi	6	Baik	6
	Jaringan	1	Baik	1
5	Aset Tetap Lainnya	1.205	Baik	1.205
	Bahan Perpustakaan	1	Baik	1
	Biota Perairan	1.204	Baik	1.204
6	Aset Tidak Berwujud	1	Baik	1
7	Aset Lain-lain	122	Baik	122
<b>Total</b>		<b>2.687</b>	Baik	<b>2.689</b>

Sumber Data : Kartu Inventaris Barang Dinas Perikanan Tahun 2024

## F. ANGGARAN DINAS PERIKANAN KABUPATEN JEMBER

Dukungan dana atau anggaran yang tersedia untuk melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Perikanan Kabupaten Jember pada tahun 2024 berasal dari APBD Kabupaten Jember. Pada tahun anggaran 2024 Dinas Perikanan Kabupaten Jember memiliki 4 Program, 10 Kegiatan, dan 28 Sub Kegiatan yang secara total mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp 9.866.537.304,- sebagaimana tersaji dalam tabel berikut :

**Tabel 1.4**  
**Anggaran Dinas Perikanan Kabupaten Jember**  
**Tahun 2024**

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran (Rp,-)
1	<b>Program</b> penunjang Urusan pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Rp 7.615.994.704
1.1	<b>Kegiatan</b> Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah	Rp 3.387.000
	<b>Sub Kegiatan</b> Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp 564.500
	<b>Sub Kegiatan</b> Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA -SKPD	Rp 564.500
	<b>Sub Kegiatan</b> Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA -SKPD	Rp 564.500
	<b>Sub Kegiatan</b> Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Rp 564.500
	<b>Sub Kegiatan</b> Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Rp 564.500
	<b>Sub Kegiatan</b> Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Rp 564.500
1.2	<b>Kegiatan</b> Administrasi Keuangan Perangkat daerah	Rp 7.000.184.908
	<b>Sub Kegiatan</b> Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp 5.833.863.408
	<b>Sub Kegiatan</b> Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Rp 1.165.757.000
	<b>Sub Kegiatan</b> Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Rp 564.500
1.3	<b>Kegiatan</b> Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Rp 580.000
	<b>Sub Kegiatan</b> Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Rp 580.000
1.4	<b>Kegiatan</b> Administrasi Umum Perangkat daerah	Rp. 250.499.500
	<b>Sub Kegiatan</b> Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp1.898.000



No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran (Rp,-)
	<b>Sub Kegiatan</b> Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp 18.298.300
	<b>Sub Kegiatan</b> Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Rp 4.064.900
	<b>Sub Kegiatan</b> Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp 89.860.800
	<b>Sub Kegiatan</b> Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp 2.850.500
	<b>Sub Kegiatan</b> Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp 133.527.000
1.5	<b>Kegiatan</b> Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 230.233.296
	<b>Sub Kegiatan</b> Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp 4.200.000
	<b>Sub Kegiatan</b> Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp. 226.033.296
1.6	<b>Kegiatan</b> Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 131.110.000
	<b>Sub Kegiatan</b> Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp 37.000.000
	<b>Sub Kegiatan</b> Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp 69.860.000
	<b>Sub Kegiatan</b> Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp 15.000.000
	<b>Sub Kegiatan</b> Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rp 4.250.000
	<b>Sub Kegiatan</b> Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp 5.000.000
2	<b>Program</b> Pengelolaan Perikanan Tangkap	Rp 157.721.796
2.1	<b>Kegiatan</b> Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	Rp 157.721.796
	<b>Sub Kegiatan</b> Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Rp 157.721.796



No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran (Rp,-)
3	<b>Program</b> Pengelolaan Perikanan Budidaya	Rp 292.820.804
3.1	<b>Kegiatan</b> Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Rp 25.000.000
	<b>Sub Kegiatan</b> Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Rp 25.000.000
3.2	<b>Kegiatan</b> Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Rp 267.820.804
	<b>Sub Kegiatan</b> Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rp 207.745.804
	<b>Sub Kegiatan</b> Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rp 60.075.000
4	<b>Program</b> Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Rp 1.800.000.000
4.1	<b>Kegiatan</b> Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi usaha Pengolahan dan Pemasaran skala Mikro dan Kecil	Rp 1.800.000.000
	<b>Sub Kegiatan</b> Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk konsumsi ikan untuk konsumsi dan usaha pengolahan dalam 1 (satu) daerah Kab/Kota	Rp 1.800.000.000
	<b>JUMLAH</b>	<b>Rp 9.866.537.304</b>

Sumber Data: Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Dinas Perikanan Tahun 2024

## G. ISU STRATEGIS

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi PD adalah kondisi yang menjadi perhatian karena dampaknya yang signifikan bagi PD dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.



Isu-isu strategis Dinas Perikanan dirumuskan dengan mempertimbangkan faktor internal dan eksternal termasuk permasalahan layanan. Adapun isu strategis Dinas Perikanan dalam melaksanakan tugas dan fungsi, yaitu:

1. Produksi perikanan budidaya kurang optimal
2. Produksi perikanan tangkap kurang optimal
3. Produksi olahan dan akses pasar masih kurang optimal
4. Masih kurangnya penerbitan dan penegakan peraturan perijinan usaha perikanan
5. Kurangnya kompetensi pelaku usaha di bidang kelautan dan perikanan



## BAB II

### PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

#### A. RENCANA STRATEGIS

Rencana strategis Dinas Perikanan merupakan penjabaran operasional Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jember tahun 2021-2026. Rencana Strategis ditetapkan dengan Peraturan Bupati Jember nomor 41 tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Jember nomor 99 tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Jember tahun 2021-2026.

Visi dan misi dalam pelaksanaan pembangunan Pemerintah Kabupaten Jember, mendasarkan pada nilai-nilai yang terkandung di dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) tahun 2005-2025. RPJPD menegaskan bahwa arah pembangunan jangka panjang daerah menggunakan visi bersama yang menjadi etos kerja.

Visi adalah suatu gambaran menantang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan instansi pemerintah. Visi Pemerintah Kabupaten Jember pada periode 2021-2026 yaitu: “Sudah waktunya membenahi Jember (Wes Wayahe Mbenahi Jember) dengan berprinsip pada sinergi, kolaborasi, dan akeselerasi dalam membangun Jember.” Yang selanjutnya dijabarkan dalam 7 (tujuh) misi pembangunan, sebagai sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh instansi pemerintah. Dengan pernyataan misi diharapkan seluruh anggota organisasi dan pihak yang berkepentingan dapat mengetahui dan mengenal keberadaan dan peran instansi pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan negara.

Sesuai *cascade* kinerja, Dinas Perikanan Misi, tujuan dan sasaran daerah yang di dukung Dinas Perikanan yaitu :

Misi ke-1 : Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan semangat sinergitas dan kolaborasi dengan semua elemen masyarakat yang berbasiskan potensi daerah.



Tujuan ke-1: Meningkatkan kualitas pertumbuhan ekonomi yang merata antar wilayah dan menguasai hajat hidup orang banyak.

Sasaran : Meningkatnya kontribusi PDRB Kategori Perikanan, dengan indikator: Kontribusi PDRB Kategori Perikanan.

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 tahun. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut.

Tujuan dan sasaran Dinas Perikanan yang diformulasikan dalam jangka menengah dan tahunan pada Rencana Strategis adalah sebagai berikut :

**Tabel 2.1**  
**Matriks Tujuan Dan Sasaran Rencana Strategis Dinas Perikanan**  
**Tahun 2021-2026**

Tujuan 1 : Meningkatnya sub sektor perikanan terhadap perekonomian daerah

Indikator Tujuan 1 : Kontribusi PDRB sub sektor perikanan

Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran pada Tahun					
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
Meningkatnya produksi produksi perikanan	1. Presentase peningkatan produksi perikanan tangkap	2,4%	0%	1.6%	1.7%	1.8%	2%
	2. Persentase peningkatan produksi perikanan budidaya	17%	2%	2%	2%	2%	2%
Meningkatnya produksi olahan perikanan	Persentase produk olahan perikanan yang bersertifikat	76%	80%	84%	88%	92%	96%

Sumber : Tabel TC 25 Rencana Strategis Dinas Perikanan tahun 2021-2026



Tujuan 2 : Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah yang profesional, efektif, dan efisien.

Indikator Tujuan 2 : Nilai SAKIP OPD

Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran pada Tahun					
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
Meningkatnya Efektifitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah	Presentase Indikator Program yang tercapai	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber : Tabel TC 25 Rencana Strategis Dinas Perikanan tahun 2021-2026

## B. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Tujuan penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja. IKU merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama PD sesuai dengan tugas fungsi dan mandat (*core business*) yang diemban. Sasaran strategis dan IKU disajikan sebagai berikut :

**Tabel 2. 2**  
**Indikator Kinerja Utama (IKU)**

Sasaran Strategis	IKU	Formulasi Perhitungan dan Penjelasan Indikator	Penanggung Jawab	Sumber Data
Meningkatnya produksi perikanan	1. Presentase peningkatan produksi perikanan tangkap	<p><b>Formulasi Perhitungan :</b></p> $\frac{P_n - (P_{n-1})}{P_{n-1}} \times 100 \%$ <p><b>Penjelasan :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Persentase peningkatan produksi perikanan dibandingkan dengan</li> </ul>	Bidang Perikanan Tangkap dan Sumber daya Perikanan	Laporan Statistik Dinas Perikanan



Sasaran Strategis	IKU	Formulasi Perhitungan dan Penjelasan Indikator	Penanggung Jawab	Sumber Data
		<p>produksi perikanan di tahun sebelumnya</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pn = Produksi Perikanan Tangkap tahun ke-n</li> <li>- Pn-1 = Produksi Perikanan Tangkap tahun n-1</li> <li>- Data Produksi perikanan tangkap diperoleh dari laporan hasil wawancara, observasi, kuisisioner dan dokumentasi</li> </ul>		
	2. Presentase peningkatan produksi perikanan budidaya	<p><b>Formulasi Perhitungan :</b></p> $\text{Peningkatan produksi} = \frac{P_n - (P_{n-1})}{P_n - 1} \times 100 \%$ <p><b>Penjelasan :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Presentase peningkatan produksi perikanan dibandingkan dengan produksi perikanan di tahun sebelumnya</li> <li>- Pn = Produksi Perikanan Budidaya tahun ke-n</li> <li>- Pn-1 = Produksi perikanan budidaya tahun n-1</li> <li>- Data Produksi perikanan budidaya diperoleh dari laporan hasil wawancara, observasi, kuisisioner dan dokumentasi</li> </ul>	Bidang Perikanan Budidaya dan Pasca Panen	Laporan Statistik Dinas Perikanan
Meningkatnya produksi olahan perikanan	Persentase Produk olahan perikanan yang bersertifikat	<p><b>Formulasi Perhitungan :</b></p> <p>Persentase Olahan Perikanan Bersertifikat</p> $= \frac{\sum \text{Produk Olahan Bersertifikat}}{\sum \text{Produk Olahan}} \times 100 \%$	Bidang Perikanan Budidaya dan Pasca Panen	Laporan Statistik Dinas Perikanan



Sasaran Strategis	IKU	Formulasi Perhitungan dan Penjelasan Indikator	Penanggung Jawab	Sumber Data
		<p><b>Penjelasan:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Persentase jumlah produk olahan Perikanan yang bersertifikat dibandingkan dengan jumlah total produk olahan perikanan</li> <li>- Produk olahan bersertifikat: adalah produk olahan berbahan ikan yang mendapat sertifikat seperti SKP (Sertifikat Kelayakan Pengolahan) yang dikeluarkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan tidak dipungut biaya (gratis), Sertifikasi PIRT yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan untuk produk makanan dan minuman skala kecil tidak sepenuhnya gratis terdapat biaya tertentu yang perlu dibayarkan oleh pemohon, dan Sertifikasi Halal yang dikeluarkan oleh Badan Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal (BPJPH) bekerjasama dengan Lembaga Pemeriksa Halal (LPH dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) biaya untuk mendapatkan sertifikasi halal dapat bervariasi tergantung</li> </ul>		



Sasaran Strategis	IKU	Formulasi Perhitungan dan Penjelasan Indikator	Penanggung Jawab	Sumber Data
		pada beberapa faktor, seperti jenis usaha, skala usaha, serta kompleksitas produk yang disertifikasi.		

Sumber : Keputusan Kepala Dinas Perikanan no 523/3.1.IV/35.09.329/2024 tentang Indikator Kinerja Utama Dinas Perikanan Kabupaten Jember

### C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Perjanjian kinerja berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Perjanjian kinerja menyajikan indikator sasaran Perangkat Daerah sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU) yang menggambarkan hasil-hasil yang utama dan kondisi yang ingin diwujudkan pada tahun berkenaan.

Sesuai PermenPANRB nomor 53 tahun 2014, perjanjian kinerja memuat IKU dan indikator lain yang relevan. Terdapat kebijakan untuk mendorong peningkatan kinerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jember dengan menambahkan indikator tambahan/penghargaan nasional dan provinsi sesuai tugas dan fungsi PD kedalam Perjanjian Kinerja PD tahun 2024.

Sesuai kebijakan percepatan pencapaian kinerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jember dengan menambahkan indikator penghargaan dalam PK tahun 2024, terdapat penambahan dua indikator, yaitu:

- Indikator “Penghargaan Satker Pelaksana Data dan Statistik Perikanan Tangkap dari Kementerian Kelautan dan Perikanan” yang ditambahkan sebagai indikator sasaran Meningkatnya Produksi Perikanan
- Indikator “Penghargaan atas peran aktif daerah dalam peningkatan Konsumsi Ikan dari Pemprov Jatim” yang ditambahkan sebagai indikator sasaran Meningkatnya Produksi Olahan Perikanan.

Pada lampiran Perjanjian Kinerja Dinas Perikanan Tahun 2024 dicantumkan sasaran strategis, indikator kinerja utama, indikator kinerja lain



yang relevan, target kinerja, program-program utama serta anggaran yang disediakan untuk mewujudkan sasaran.

**Tabel 2.3**  
**Perjanjian Kinerja Tahun 2024 Dinas Perikanan**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2024
1.	Meningkatnya Produksi Perikanan	Persentase peningkatan produksi perikanan tangkap	1,7 %
		Penghargaan Satker Pelaksana Data dan Statistik Perikanan Tangkap dari Kementerian Kelautan dan Perikanan	Peringkat 10
		Persentase peningkatan produksi perikanan budidaya	2 %
2	Meningkatnya Produksi Olahan Perikanan	Persentase produk olahan perikanan yang bersertifikat	88 %
		Penghargaan atas peran aktif daerah dalam peningkatan Konsumsi Ikan dari Pemprov Jatim	56 kg/kapita/thn

Sumber: Dokumen Perjanjian Kinerja Dinas Perikanan tahun 2024

Program	Anggaran	Keterangan
1. Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 7.572.169.704	APBD
2. Pengelolaan Perikanan Tangkap	Rp. 157.721.796	APBD
3. Pengelolaan Perikanan Budidaya	Rp. 292.820.804	APBD, DAK
4. Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Rp. 1.800.000.000	APBD, DAK
<b>Jumlah</b>	<b>Rp. 9.822.712.304</b>	

Namun Perjanjian Kinerja Dinas Perikanan Kabupaten Jember pada tahun 2024 di mengalami perubahan indikator penghargaan, yaitu dihapusnya 2 (dua) indikator “Penghargaan atas Peran Aktif Daerah dalam Peningkatan Konsumsi Ikan dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur” yang tidak lagi digunakan, penghargaan diberikan sebagai bentuk apresiasi kepada pemerintah Kabupaten/kota yang berhasil meningkatkan konsumsi ikan di wilayahnya. Namun, pemberian penghargaan ini tidak selalu diselenggarakan



setiap tahun secara tetap. Hal ini tergantung pada kebijakan pemerintah provinsi, alokasi anggaran, serta program-program yang sedang berjalan. Umumnya, penghargaan ini terkait dengan program Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (Gemarikan), yang bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya konsumsi ikan untuk kesehatan gizi. Pemerintah Provinsi biasanya memberkan penghargaan berdasarkan evaluasi pencapaian program tersebut di masing-masing daerah.

Dan indikator “Penghargaan Satker Pelaksana Data dan Statistik Perikanan Tangkap dari Kementerian Kelautan dan Perikanan” yang tidak selalu diadakan setiap tahun, Hal ini tergantung pada kebijakan KKP (Kementerian Kelautan dan Perikanan), alokasi anggaran, serta program-program yang sedang berjalan. Penghargaan ini biasanya disesuaikan dengan kebutuhan untuk meningkatkan kualitas dan akurasi data perikanan, mendorong inovasi dan perbaikan dalam pengelolaan data, dan memotivasi satker dan lembaga terkait untuk terus berusaha mencapai standar yang lebih tinggi dalam pengumpulan dan penyajian data perikanan tangkap.

Pada akhir tahun tepatnya pada tanggal 25 November 2024 terjadi perubahan anggaran untuk pembayaran gaji ASN dan Non ASN dikarenakan anggaran sebelumnya tidak mencukupi akibat perubahan kebutuhan selama tahun anggaran berjalan, Sehingga untuk mengatasi hal tersebut Dinas Perikanan mengajukan permohonan penambahan anggaran APBD Tahun 2024 pada sub kegiatan 3.25.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN sebesar Rp. 25.825.000,- dan sub Kegiatan 3.25.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN sebesar Rp. 18.000.000,-

Berikut Perjanjian Kinerja – Perubahan Tahun 2024 Dinas Perikanan disertai dengan Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.

**Tabel 2.4**  
**Perjanjian Kinerja - Perubahan Tahun 2024 Dinas Perikanan**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2024
1.	Meningkatnya Produksi	Persentase peningkatan	1,7 %



	Perikanan	produksi perikanan tangkap	
		Persentase peningkatan produksi perikanan budidaya	2 %
2	Meningkatnya Produksi Olahan Perikanan	Persentase produk olahan perikanan yang bersertifikat	88 %

Sumber: Dokumen Perjanjian Perubahan Kinerja Dinas Perikanan tahun 2024

Program	Anggaran	Keterangan
1. Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 7.615.994.704	P – APBD
2. Pengelolaan Perikanan Tangkap	Rp. 157.721.796	P – APBD
3. Pengelolaan Perikanan Budidaya	Rp. 292.820.804	P – APBD, DAK
4. Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Rp. 1.800.000.000	P – APBD, DAK
<b>Jumlah</b>	<b>Rp. 9.866.537.304</b>	

#### D. ALOKASI ANGGARAN PER SASARAN TAHUN 2024

Berdasarkan Rencana Kinerja Tahunan Dinas Perikanan terlampir, dapat diketahui proporsi pengalokasian belanja pada program pendukung pencapaian sasaran sebagai berikut:

a) Sasaran Strategis I : Meningkatkan Produksi Perikanan,

Indikator Kinerja:

1. Persentase peningkatan produksi perikanan tangkap
2. Persentase peningkatan produksi perikanan budidaya

Didukung oleh :

- Program Pengelolaan Perikanan Tangkap dengan Anggaran Rp.157.721.796
- Program Pengelolaan Perikanan Budidaya dengan Anggaran Rp.292.820.804

Keseluruhan anggaran Program sejumlah Rp.450.542.600 yang dialokasikan untuk sasaran I adalah sebesar 5% dari keseluruhan belanja langsung Dinas Perikanan Kabupaten Jember.



b) Sasaran Strategis II : Persentase produk olahan perikanan yang bersertifikat  
Indikator Kinerja: Persentase produk olahan perikanan yang bersertifikat  
Didukung oleh :

- Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan dengan Anggaran Rp. 1.800.000.000

Keseluruhan anggaran Program sejumlah Rp. 1.800.000.000 yang dialokasikan untuk sasaran II adalah sebesar 18% dari keseluruhan belanja langsung Dinas Perikanan Kabupaten Jember.



**BAB III**  
**AKUNTABILITAS KINERJA**

**A. KERANGKA PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2024**

Pengukuran capaian sasaran bertujuan untuk mengetahui tingkat keberhasilan dan kegagalan Dinas Perikanan dalam merealisasikan target- target yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah. Pengukuran capaian indikator kinerja Dinas Perikanan menggunakan ketentuan sebagai berikut:

1. Predikat nilai realisasi kinerja dikelompokkan dalam skala nilai dengan pendekatan penilaian capaian kinerja dengan kriteria sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri RI nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah sebagai berikut :

Tabel 3.1  
Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode
1.	$\geq 90$	Sangat Tinggi	
2.	$76 \leq 90$	Tinggi	
3.	$66 \leq 75$	Sedang	
4.	$51 \leq 65$	Rendah	
5.	$\leq 50$	Sangat Rendah	

Sumber : Permendagri nomor 86 tahun 2017

2. Cara menghitung prosentase capaian indikator kinerja adalah :
  - a. Bilamana Indikator Sasaran mempunyai makna **progress positif**, yaitu semakin tinggi realisasinya menunjukkan semakin tinggi kinerjanya atau



semakin rendah realisasinya menunjukkan semakin rendah kinerjanya, maka capaian kinerjanya menggunakan rumus :

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100$$

- b. Bilamana Indikator Sasaran mempunyai makna **progress negative**, yaitu semakin tinggi realisasinya menunjukkan semakin rendah kinerjanya atau semakin rendah realisasinya menunjukkan semakin tinggi kinerjanya, maka capaian kinerjanya menggunakan rumus :

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target})}{\text{Target}} \times 100$$

## B. CAPAIAN KINERJA DINAS PERIKANAN

Dinas Perikanan telah melaksanakan penilaian kinerja dengan mengacu pada Perjanjian Kinerja Dinas Perikanan tahun 2024 yang telah disepakati. Penilaian ini dilakukan untuk mengevaluasi dan mengukur dalam rangka pengumpulan data kinerja yang hasilnya akan memberikan gambaran keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran.

Pengukuran target kinerja yang telah ditetapkan oleh Dinas Perikanan dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Serta membandingkan antara realisasi pada tahun 2024 dengan target pada akhir periode Renstra untuk mengetahui kemajuan yang telah dicapai.

. Tabel 3.2

**Pengukuran Realisasi Kinerja Tahun 2024**

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Target 2024	Realisasi 2024	Tingkat Capaian Kinerja (%) realisasi)	Target Akhir Renstra (2026)	Tingkat capaian terhadap target akhir renstra
1	2	3	4	5	6 (5/4*100%)	7	8 (5/7*100%)
1.	Meningkatnya Produksi	Presentase Peningkatan	1,7%	1,6%	96%	2%	80%



No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Target 2024	Realisasi 2024	Tingkat Capaian Kinerja (% realisasi)	Target Akhir Renstra (2026)	Tingkat capaian terhadap target akhir renstra
	Perikanan	Produksi Perikanan Tangkap					
		Presentase Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya	2%	2%	100%	2%	100%
2.	Meningkatnya Produksi Olahan Perikanan	Presentase Produk Olahan Perikanan Yang Bersertifikat	88%	87%	99%	96%	91%

Sumber Data Realisasi : Dinas Perikanan Kabupaten Jember 2024

Dari tabel diatas terlihat bahwa capaian 3 (tiga) indikator sasaran Dinas Perikanan rata rata mencapai 98% dan masuk dalam kategori sangat memuaskan. Dan dibandingkan dengan target akhir periode Renstra, realisasi tahun 2024 menunjukkan peningkatan,

Perhitungan data realisasi per sasaran adalah sebagai berikut :

Realisasi Sasaran 1 :

**Indikator pertama**, yaitu persentase peningkatan produksi perikanan tangkap th 2024, didapatkan dari Formulasi Perhitungan :

Peningkatan produksi

$$= \frac{P_n - (P_{n-1})}{P_{n-1}} \times 100 \%$$

$$= \frac{14.021 \text{ Ton} - (13.795 \text{ Ton})}{13.795 \text{ Ton}} \times 100 \%$$

$$= 1,6\%$$



**Indikator kedua**, yaitu persentase peningkatan produksi perikanan budidaya th 2024, didapatkan dari didapatkan dari Formulasi Perhitungan :

Peningkatan produksi

$$= \frac{P_n - (P_{n-1})}{P_{n-1}} \times 100 \%$$

$$= \frac{15.787 \text{ Ton} - (15.480 \text{ Ton})}{15.480 \text{ Ton}} \times 100 \%$$

$$= 2\%$$

Realisasi Sasaran 2 :

**Indikator** persentase Produk Olahan Perikanan Yang Bersertifikat th 2024, didapatkan dari Formulasi Perhitungan :

$$= \frac{\sum \text{Produk Olahan Bersertifikat}}{\sum \text{Produk Olahan}} \times 100$$

$$= \frac{\sum 55 \text{ Produk Olahan Bersertifikat}}{\sum 63 \text{ Total Produk Olahan}} \times 100$$

$$= 87\%$$

Dengan demikian maka secara umum Dinas Perikanan telah melaksanakan tugas pokok fungsi dalam bidang kelautan dan perikanan secara baik dalam rangka mencapai tujuan organisasi seperti yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Perikanan tahun 2021 -2026.

Selanjutnya untuk mengetahui tren realisasi dari sasaran organisasi, juga dilakukan pengukuran kinerja dengan membandingkan capaian kinerja tahun 2024 dengan tahun tahun sebelumnya.



**Tabel 3.3**  
**Perbandingan Capaian kinerja Sasaran tahun 2024 dengan tahun sebelumnya**

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Realisasi			
		2021	2022	2023	2024
Sebelum Perubahan					
Meningkatnya Nilai PDRB Sub Sektor Perikanan	Nilai PDRB Sub Sektor Perikanan	1.665 M	1.157 M	-	-
Setelah Perubahan					
Meningkatnya Produksi Perikanan	Presentase Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap	-	-	1,5%	1,6%
	Presentase Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya	-	-	1,5%	2%
Meningkatnya Produksi Olahan Perikanan yang Bersertifikat	Presentase Produk olahan perikanan yang bersertifikat	-	-	69%	87%

Sumber Data Realisasi: Dinas Perikanan Kab. Jember (2024)

Perbandingan capaian kinerja sasaran tahun 2024 dengan tahun sebelumnya sebagai berikut:

**Sasaran Strategis 1 : Meningkatnya Produksi Perikanan**

Berdasarkan data tabel 3.3, menunjukkan tren peningkatan realisasi sejak kurun waktu tahun 2021 s.d 2024. Sasaran strategis meningkatnya produksi perikanan, diukur dengan 2 (dua) indikator sasaran, yaitu:

1. Indikator sasaran Presentase Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap dihitung berdasarkan data produksi sebagai berikut:
  - a. Tahun 2021 yaitu 13.398,8 Ton
  - b. Tahun 2022 yaitu 13,591,0 Ton
  - c. Tahun 2023 yaitu 13.795,0 Ton
  - d. Tahun 2024 yaitu 14,021,0 Ton

Berdasarkan data produksi perikanan tangkap tersebut, presentase peningkatan produksi tahun 2022 sebesar 1,4% sedangkan presentase peningkatan produksi tahun 2023 sebesar 1,5% dan presentase kenaikan produksi tahun 2024 sebesar 1,6%. Dapat terlihat jika dibandingkan dengan



presentase peningkatan produksi tahun 2023 maka pada tahun 2024 presentase peningkatan mengalami kenaikan sebesar 1,6% dengan capaian 96%. Peningkatan produksi perikanan tangkap ini dikarenakan oleh faktor cuaca yang mendukung serta musim ikan yang sangat bagus sehingga berpengaruh terhadap hasil tangkapan nelayan.

Jenis faktor pendukung data perikanan tangkap di wilayah kabupaten jember dibagi menjadi 2 faktor yaitu Perikanan Tangkap Laut dengan beberapa jenis ikan seperti Tongkol, Layur, Ikan Tengiri, Tuna dan dll. Perikanan Tangkap Perairan Umum dengan jenis ikan seperti Udang Tawar, Mujaer, Tawes, Nila dan dll. Data perikanan tangkap laut diperoleh dari kinerja UPT TPI Puger, Gumukmas, dan Watu ulo yang mendukung penyediaan data jumlah produksi perikanan tangkap laut. Untuk penyediaan data perikanan tangkap perairan umum yang juga didapat dari data pokmaswas (Kelompok Masyarakat Pengawas).

2. Sedangkan untuk indikator sasaran Presentase Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya dihitung berdasarkan data produksi sebagai berikut:
  - a. Tahun 2021 yaitu 13.412,8 Ton
  - b. Tahun 2022 yaitu 15.250,0 Ton
  - c. Tahun 2023 yaitu 15.479,7 Ton
  - d. Tahun 2024 yaitu 15,787,0 Ton

Berdasarkan data produksi perikanan budidaya tersebut presentase kenaikan produksi tahun 2022 sebesar 14% sedangkan presentase kenaikan produksi tahun 2023 sebesar 1,5% dan presentase kenaikan produksi tahun 2024 sebesar 2%. Kenaikan produksi tersebut dikarenakan jumlah benih yang ditanam dan luas lahan budidaya serta rasio antara produksi perikanan dan jumlah RTP budidaya berpengaruh positif dan signifikan terhadap peningkatan produksi budidaya. Jika dibandingkan dengan persentase peningkatan produksi tahun 2023 sebesar 1,5%, maka pada tahun 2024 persentase peningkatan produksi mengalami kenaikan dengan capaian sebesar 100%, hal ini disebabkan peran Dinas Perikanan melaksanakan kegiatan pemberian pendampingan dan pembinaan teknis



terhadap pembudidaya, dan penyediaan sarana prasarana pembudidayaan melalui program Pengelolaan Perikanan Budidaya

Jenis faktor pendukung data produksi budidaya di wilayah kabupaten jember ialah jumlah produksi budidaya di UPTD PBAT Rambigundam dan kalisat beserta jumlah produksi kelompok pembudidayaan ikan di kabupaten jember serta jenis ikan yang di pembudidaya yaitu Ikan lele, Gurame, Nila dan dll.

## **Sasaran Strategis 2: Meningkatnya Produksi Olahan Perikanan yang Bersertifikat**

### 1. Presentase Produk Olahan Perikanan yang Bersertifikat;

Data Persentase Produk Olahan yang bersertifikat di Wilayah Kabupaten Jember adalah sebagai berikut :

- a. Tahun 2021 : Jumlah produk olahan perikanan sejumlah 39 unit, sedangkan Jumlah produk olahan yang bersertifikat sejumlah 20 unit, sehingga perhitungan realisasi sebesar 51%
- b. Tahun 2022 : Jumlah produk olahan perikanan sejumlah 42 unit, sedangkan Jumlah produk olahan yang bersertifikat sejumlah 25 unit, sehingga perhitungan realisasi sebesar 60%
- c. Tahun 2023 : Jumlah produk olahan perikanan sejumlah 51 unit, sedangkan Jumlah produk olahan yang bersertifikat sejumlah 35 unit, sehingga perhitungan realisasi sebesar 69%
- d. Tahun 2024 : Jumlah produk olahan perikanan sejumlah 63 unit, sedangkan Jumlah produk olahan yang bersertifikat sejumlah 55 unit, sehingga perhitungan realisasi sebesar 87%

Dalam melakukan sertifikasi produk olahan perikanan, tidak luput dari peran Dinas Perikanan dalam memberikan pendampingan dan pelatihan kepada kelompok pengolah dan pemasar (Poklamsar) dan UMKM perikanan terkait dengan cara pengelolaan makanan berbahan ikan yang baik (GMP) serta Dinas Perikanan bekerjasama dengan Penyuluh Perikanan Pusat untuk memberikan bimbingan dan membantu kelompok Poklamsar dan UMKM untuk mendapatkan sertifikasi terkait aspek SKP, Sertifikat Halal, dan UPI.



**Tabel 3.4**

**(Perbandingan Realisasi Kinerja Dinas Perikanan dengan Realisasi Nasional/ Regional Jawa Timur/ Realisasi Kabupaten)**

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Realisasi Th.2024	Realisasi Nasional	Ket. (+/-)
1	Meningkatnya Produksi Perikanan	Presentase Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap	1,6%	-	tidak dapat diperbandingkan dengan realisasi nasional atau realisasi kabupaten dan kota se- Provinsi Jawa Timur dikarenakan tidak adanya data realisasi untuk indikator yang sama.
		Presentase Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya	2%	-	tidak dapat diperbandingkan dengan realisasi nasional atau realisasi kabupaten dan kota se- Provinsi Jawa Timur dikarenakan tidak adanya data realisasi untuk indikator yang sama.
2	Meningkatnya Produksi Olahan Perikanan yang Bersertifikat	Presentase Produk Olahan Perikanan yang Bersertifikat	87%	-	tidak dapat diperbandingkan dengan realisasi nasional atau realisasi kabupaten dan kota se- Provinsi Jawa Timur dikarenakan tidak adanya data realisasi untuk indikator yang sama.

*Sumber Data: Dinas Perikanan Kab. Jember (2024)*

### C. ANALISIS PROGRAM KEGIATAN YANG MENDUKUNG SASARAN

**Tabel 3.5**  
**Program Pendukung Sasaran**

Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Pendukung Sasaran	Anggaran Rp.9.866.537.304	Realisasi Rp.8477.267.467	% Serapan Anggaran
Meningkatnya Produksi Perikanan	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Rp.157.721.796	Rp140.577.200	89%
	Kegiatan Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	Rp.157.721.796	Rp140.577.200	89%
	Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Rp.157.721.796	Rp140.577.200	89%
	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Rp 292.820.804	Rp 279.945.000	96%
	Kegiatan Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Rp 25.000.000	Rp 25.000.000	100%
	Sub Kegiatan Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Rp 25.000.000	Rp 25.000.000	100%
	Kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Rp 267.820.804	Rp 254.945.000	95%
	Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rp 207.745.804	Rp 198.125.000	95%
	Sub Kegiatan Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rp 60.075.000	Rp 56.820.000	95%
	<b>Total</b>	<b>Rp 450.542.600</b>	<b>Rp 420.522.200</b>	<b>89%</b>

Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Pendukung Sasaran	Anggaran Rp.9.866.537.304	Realisasi Rp.8477.267.467	% Serapan Anggaran
Meningkatnya Produksi Olahan Perikanan	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Rp1.800.000.000	Rp. 1.768.988.000	98%
	Kegiatan Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi usaha Pengolahan dan Pemasaran skala Mikro dan Kecil	Rp1.800.000.000	Rp. 1.768.988.000	98%
	Sub Kegiatan Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk konsumsi ikan untuk konsumsi dan usaha pengolahan dalam 1 (satu) daerah Kab/Kita	Rp1.800.000.000	Rp. 1.768.988.000	98%
	<b>Total</b>	<b>Rp 1.800.000.000</b>	<b>Rp1.768.988.000</b>	<b>98%</b>
Meningkatnya Efektifitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah	Program penunjang Urusan pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Rp 7.615.994.704	Rp 6.287.757.267	83%
	Kegiatan Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah	Rp 3.387.000	Rp 420.000	12%
	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp 564.500	Rp 0	0%
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA -SKPD	Rp 564.500	Rp 0	0%
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA -SKPD	Rp 564.500	Rp 0	0%
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-	Rp 564.500	Rp 0	0%



Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Pendukung Sasaran	Anggaran Rp.9.866.537.304	Realisasi Rp.8477.267.467	% Serapan Anggaran
	SKPD			
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Rp 564.500	Rp 0	0%
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Rp 564.500	Rp 0	0%
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat daerah	Rp 7.000.184.908	Rp 5.712.235.584	84%
	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp 5.833.863.408	Rp 4.600.185.089	79%
	Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Rp 1.165.757.000	Rp 1.112.050.495	95%
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Rp 564.500	Rp 0	0%
	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Rp 580.000	Rp 250.000	43%
	Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Rp 580.000	Rp 250.000	43%
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat daerah	Rp. 250.499.500	Rp 232.833.752	93%
	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp1.898.000	Rp 1.754.600	92%
	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp 18.298.300	Rp 10.926.400	60%



Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Pendukung Sasaran	Anggaran Rp.9.866.537.304	Realisasi Rp.8477.267.467	% Serapan Anggaran
	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Rp 4.064.900	Rp 3.233.500	80%
	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp 89.860.800	Rp 83.533.460	93%
	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp 2.850.500	Rp 1.630.000	57%
	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp 133.527.000	Rp 131.755.792	99%
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 230.233.296	Rp 221.019.592	96%
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp 4.200.000	Rp 3.350.000	80%
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp. 226.033.296	Rp 217.669.952	96%
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 131.110.000	Rp 120.997.979	92%
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp 37.000.000	Rp 36.104.374	98%
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau	Rp 69.860.000	Rp 61.312.470	88%



Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Pendukung Sasaran	Anggaran Rp.9.866.537.304	Realisasi Rp.8477.267.467	% Serapan Anggaran
	Lapangan			
	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp 15.000.000	Rp 14.875.000	99%
	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rp 4.250.000	Rp 3.781.135	89%
	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp 5.000.000	Rp 4.925.000	99%
	<b>Total</b>	<b>Rp 1.800.000.000</b>	<b>Rp1.768.988.000</b>	<b>98%</b>

Pelaksanaan program/ kegiatan / sub kegiatan guna mendukung tercapainya kinerja **Sasaran Meningkatnya Produksi Perikanan** adalah sebagai berikut:

1. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap

**Kegiatan** Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota

**Sub Kegiatan** Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil

	Uraian Input/ Output	Satuan	Target	Realisasi
Input	Jumlah Dana	Rp	157.721.796	140.577.200
Output	Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkatkan Kapasitasnya	Orang	1.500	998

Keterangan Pelaksanaan Kegiatan:

Sosialisasi dan Pemberian Bantuan Premi Asuransi Nelayan



Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil yang dilakukan oleh Dinas Perikanan Kabupaten Jember adalah dengan melakukan pemberian perlindungan dan jaminan keselamatan nelayan melalui program ASNEL (Asuransi Nelayan) yang ditujukan bagi nelayan miskin, nelayan tradisional dan nelayan pemilik kapal yang berdomisili di Kabupaten Jember yang ditetapkan melalui Keputusan Bupati Jember. Sasaran Bantuan Premi Asuransi bagi Nelayan meliputi nelayan dengan risiko yang dijamin diantaranya adalah kematian, cacat tetap, biaya pengobatan dan santunan kematian alami. Kegiatan sosialisasi Asnel juga dilakukan dengan harapan menumbuhkan kesadaran bagi nelayan terhadap pentingnya berasuransi. Pada tahun 2024 ditargetkan kepada 1.500 Nelayan tetapi hanya mampu mencakup 998 jiwa dari target dikarenakan anggaran yang tersedia pada tahun 2024 belum cukup untuk membiayai seluruh target peserta.

## 2. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya

### **Kegiatan** Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil

**Sub kegiatan** Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan

	Uraian Input/ Output	Satuan	Target	Realisasi
Input	Jumlah Dana	Rp	25.000.000	25.000.000
Output	Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu	Kelompok	10	10

Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan			
--	--	--	--

Keterangan Pelaksanaan Kegiatan:

Pemberian Pelatihan Aquaponik dan Hidroponik



Pelatihan Aquaponik dan Hidroponik melibatkan Pokja 3 TP PKK di 31 Kecamatan di Kabupaten Jember. Kegiatan tersebut diisi dengan pelatihan pembuatan aquaponik dengan memanfaatkan pekarangan atau lahan sempit di rumah. Diharapkan dengan kegiatan tersebut juga bisa menambah pengetahuan dan wawasan TP PKK untuk ikut mengedukasi di masing-masing kecamatan terkait pemanfaatan lahan sempit sebagai sarana budidaya ikan dan dapat menambah nilai gizi keluarga.

### Kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan

**Sub Kegiatan** Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

	Uraian Input/ Output	Satuan	Target	Realisasi
Input	Jumlah Dana	Rp	207.745.804	198.125.000
Output	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Unit	60	60

Keterangan Pelaksanaan Kegiatan:

Pemenuhan sarana pakan ikan di UPTD. PBAT Rambigundam



Penyediaan prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota ini mencakup belanja pakan ikan guna mendukung meningkatkan produktivitas dan optimalisasi hasil perikanan budidaya. Sumber dana pada sub kegiatan ini bersumber dari 2 alokasi anggaran yaitu Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Alokasi Umum (DAU).

**Sub Kegiatan** Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

	Uraian Input/ Output	Satuan	Target	Realisasi
Input	Jumlah Dana	Rp	60.075.000	56.820.000
Output	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Unit	12	12

Keterangan Pelaksanaan Kegiatan:

Bantuan paket budidaya serta Bimbingan Teknis kepada penerima bantuan





Pada sub Kegiatan Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota yang dikenal dengan Okke Masse (One Keluarga One Kolam Masyarakat Sejahtera) ditujukan kepada masyarakat pra sejahtera dan anak-anak yang mengalami stunting dengan memberikan paket budidaya serta pendampingan langsung kepada penerima. Pada tahun 2024 sebanyak 15 Keluarga yang mendapatkan bantuan sarana budidaya.

Pelaksanaan program/ kegiatan / sub kegiatan guna mendukung tercapainya kinerja **Sasaran Meningkatnya Produksi Olahan Perikanan** adalah sebagai berikut:

1. Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan

**Kegiatan** Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi usaha Pengolahan dan Pemasaran skala Mikro dan Kecil

**Sub Kegiatan** Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk konsumsi ikan untuk konsumsi dan usaha pengolahan dalam 1 (satu) daerah Kab/Kita

	Uraian Input/ Output	Satuan	Target	Realisasi
Input	Jumlah Dana	Rp	1.800.000.000	1.768.988.000
Output	Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten /Kota	Ton	286	154



Keterangan Pelaksanaan Kegiatan:  
Rehabilitasi Integrated Cold Storage (ICS)



Integrated Cold Storage (ICS) atau gudang beku terintegrasi adalah fasilitas pengolahan ikan yang dilengkapi dengan sarana pembekuan dan gudang beku yang dirancang untuk meminimalkan risiko penurunan kualitas ikan. ICS memiliki peran penting dalam rantai pasok produk pangan, baik lokal maupun global untuk memastikan persediaan pangan yang merata dan berkelanjutan di seluruh wilayah Kabupaten Jember. Rehabilitasi Integrated Cold Storage (ICS) berasal dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2024.

Keterangan Pelaksanaan Kegiatan:  
Sosialisasi/Edukasi Gemarikan (Gerakan Memasyarakatkan Ikan)



Kegiatan Gemarikan adalah sebagai upaya peningkatan gizi sejak dini dan meningkatkan konsumsi ikan masyarakat Indonesia. Tujuannya adalah mengkampanyekan pentingnya makan ikan terutama untuk pertumbuhan dan kecerdasan serta membantu dalam mencegah



terjadinya stunting pada anak-anak khususnya di Kabupaten Jember. Dalam Kegiatan ini Dinas Perikanan Kabupaten Jember juga membagikan olahan Kudapan Anak berbahan dasar ikan dan goodie bag berupa olahan ikan.

Ada beberapa faktor yang menjadi penyebab rendahnya ketersediaan ikan untuk konsumsi ikan. Pertama, kurangnya infrastruktur yang dibutuhkan untuk mendistribusikan ikan berkualitas tinggi ke konsumen, termasuk infrastruktur pasar yang modern dan mendukung, stok es yang minim, atau kurangnya pendingin di kapal. Masa hidup komoditas ikan segar cenderung pendek, sehingga pengolahan ikan mulai dari kapal sampai ke konsumen harus dilakukan secara memadai dengan rantai nilai yang efektif. Jika tidak, kualitas ikan akan menurun dan konsumsi ikan akan terkena imbasnya.

#### **D. ANALISIS ATAS EFISIENSI SUMBER DAYA**

Sumber daya adalah nilai potensi yang dimiliki dalam mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra). Sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah adalah sumber daya manusia, sarana prasarana kantor dan anggaran dalam Dokumen Pelaksanaan anggaran 2024 untuk melaksanakan program dan kegiatan dalam rangka mencapai sasaran dan tujuan organisasi.

Sumberdaya Manusia Dinas Perikanan berjumlah 63 orang, dengan jumlah anggaran sebesar Rp 9.866.537.304, melaksanakan 4 program 10 kegiatan dan 28 sub kegiatan untuk mendukung tercapainya kinerja sasaran strategis, yang menunjukkan tingkat efisiensi penggunaan sumber daya sebagai berikut :



**Tabel 3.6**

**Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

Sasaran	% Capaian Kinerja	% Serapan Anggaran	Kategori Efisiensi
1. Meningkatnya Produksi Perikanan			
a. Presentase Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap	96%	89%	Efisien
b. Presentase Peningkatan Perikanan Budidaya	100%	96%	Efisien
2. Meningkatnya Produksi Olahan Perikanan yang Bersertifikat	99%	98%	Efisien

Sumber : data persentase capaian kinerja pada tabel 3.2 ; data % serapan anggaran pada tabel 3.6

Capaian kinerja Sasaran 1: Meningkatnya Produksi Perikanan dapat dikategorikan efisien karena 98% capaian kinerja lebih besar daripada 93% serapan anggaran.

Capaian kinerja Sasaran 2: Meningkatnya Produksi Olahan Perikanan yang Bersertifikat dapat dikategorikan efisien karena 99% capaian kinerja lebih besar daripada 98% serapan anggaran.

**E. EVALUASI DAN ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN DAN KEGAGALAN**

Analisis capaian kinerja Dinas Perikanan menggunakan metode yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Dari hasil pengukuran kinerja, dilakukan evaluasi dan analisis faktor penyebab keberhasilan capaian kinerja sasaran sebagai berikut:



**Tabel 3.7**  
**Rekapitulasi Predikat Capaian Kinerja pada tahun 2024**

Sasaran/ Indikator Sasaran	% Capaian	Predikat Kinerja				
		Sangat Tinggi	Tinggi	Sedang	Rendah	Sangat Rendah
<b>Sasaran 1</b> <b>Meningkatnya Produksi Perikanan</b>						
Persentase peningkatan produksi perikanan tangkap	96%	√	-	-	-	-
Persentase peningkatan produksi perikanan budidaya	100%	√	-	-	-	-
Rata rata capaian	98%		-	-	-	-
<b>Sasaran 2</b> <b>Meningkatnya Produksi Olahan Perikanan</b>						
Persentase produk olahan perikanan yang bersertifikat	99%	√	-	-	-	-
Rata rata capaian	99%		-	-	-	-

Sumber : tabel 3.2 – 3.4 LKIP tahun 2024

**Sasaran Strategis 1: Meningkatnya Produksi Perikanan**

- a. Presentase Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap
- b. Presentase Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya

Hasil evaluasi kinerja atas rekapitulasi capaian kinerja pada tabel 3.5 menunjukkan sasaran Meningkatnya Produksi Perikanan mencapai predikat sangat tinggi yaitu mempunyai nilai capaian rata – rata 98%,

- Penyebab keberhasilan dalam peningkatan produksi perikanan tangkap adalah:
  - a) Ketersediaan sumber daya laut yang dimiliki wilayah perairan kabupaten Jember yang luas sebesar 8.338,5 Km<sup>2</sup> dan kaya akan keanekaragaman hayati.
  - b) Dukungan Dinas Perikanan melalui program pemberian Asuransi Nelayan sebanyak 998 Nelayan.
  - c) Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelompok Usaha Bersama (KUB) sejumlah 1 Kelompok Baru, dimana dengan bertambahnya



- jumlah KUB, maka membantu anggota meningkatkan produktivitas dan kualitas hasil panen serta meningkatkan keterampilan anggota.
- d) Meningkatnya kesadaran nelayan terhadap pentingnya praktik penangkapan yang berkelanjutan.
- Faktor kendala dalam proses pencapaian target peningkatan produksi perikanan pada perikanan tangkap diantaranya adalah:
    - a) Penangkapan ikan yang tergantung pada musim dan cuaca, perubahan iklim mengganggu pola migrasi ikan dan keamanan nelayan.
    - b) Produktifitas kapal penangkapan ikan belum optimal dan masih didominasi kapal dengan skala kecil dan tradisional
    - c) Terbatasnya peluang akses permodalan nelayan
    - d) Perhitungan data produksi yang masih manual sehingga dapat menyebabkan perhitungan data produksi kurang optimal dan tidak dapat disajikan secara *real time*.
  - Solusi terhadap kendala kedepan diharapkan peningkatan produksi perikanan tangkap dapat tercapai secara berkelanjutan tanpa merusak ekosistem laut dalam dengan cara:
    - a) Peningkatan keterampilan SDM nelayan dalam kegiatan penangkapan ikan, edukasi mengenai penggunaan teknologi, manajemen perikanan berkelanjutan dan diversifikasi usaha.
    - b) Peningkatan sarana dan prasarana penangkapan seperti fasilitas tempat pendaratan ikan yang memadai, peningkatan peralatan dan alat bantu penangkapan ikan menjadi kegiatan prioritas.
  - Rencana perbaikan kedepan adalah dengan:
    - a) Mengembangkan platform berbasis teknologi untuk pencatatan hasil tangkapan.
    - b) Pemberian bantuan alat penangkapan ikan ramah lingkungan dan sarana alat bantu penangkapan ikan yang lebih ramah lingkungan dan efisien.
    - c) Meningkatkan akses nelayan terhadap sumber daya finansial melalui peningkatan kerja sama dengan lembaga keuangan dan pelatihan manajemen keuangan untuk nelayan.



- Inovasi dan / atau program kolaborasi dengan stakeholder antara lain adalah Program Asuransi Nelayan dianggarkan langsung oleh APBD dan bekerjasama dengan pihak asuransi melalui nota kesepakatan antara Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Cabang Jember dengan Pemerintah Kabupaten Jember tentang kepesertaan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Nelayan di Kabupaten Jember.
- Faktor pendorong keberhasilan peningkatan produksi perikanan budidaya baik budidaya ikan air tawar maupun budidaya ikan air payau (tambak) tidak lepas dari peran Dinas Perikanan adalah dengan melaksanakan:
  - a) Kegiatan pendampingan dan pembinaan teknis terhadap pembudidaya ikan
  - b) Monitoring kualitas air maupun kesehatan lingkungan budidaya serta
  - c) Penyediaan bibit ikan unggul di Balai Benih Ikan.
- Sedangkan faktor kendala dalam proses pencapaian target peningkatan produksi pada perikanan budidaya adalah
  - a) Berkurangnya lahan untuk budidaya mina padi
  - b) Masih tingginya harga pakan ikan
  - c) Skala usaha budidaya masih kecil dan menjadi usaha sampingan dan
  - d) Ketersediaan benih ikan unggul yang masih terbatas.
- Upaya yang telah dilaksanakan oleh Dinas Perikanan dalam meningkatkan nilai tersebut, antara lain:
  - a) Memberikan Pendampingan dan Pelatihan Bagi Pembudidaya Ikan.
  - b) Meningkatkan Sarana Prasarana Pembudidayaan Ikan untuk Meningkatkan Produksi Benih Ikan Berupa Pakan Ikan UPTD-PBAT sebanyak 60 Unit.
  - c) Memberikan Sarana Pembudidayaan Ikan sebanyak 15 Paket Melalui Program Satu Keluarga Satu Kolam yang terdiri dari paket berisi: Kolam terpal bundar diameter 2 dan pakan ikan serta benih ikan lele.
- Solusi terhadap kendala kedepan adalah
  - a) Pemberian bantuan sarana dan prasarana budidaya serta penyediaan benih dan induk ikan unggul



- b) Pendampingan pada kelas kelompok pelaku usaha perikanan pemula
- Rencana perbaikan kedepan yang dilakukan oleh Dinas Perikanan Kabupaten Jember adalah:
  - a) Penyediaan jalan produksi dan saluran tambak yang representative
  - b) Menggalakkan program pakan ikan mandiri
  - c) Penguatan kelembagaan kelompok pelaku usaha perikanan
- Inovasi dan / atau program kolaborasi dengan *stakeholder* antara lain adalah sasaran pemberian bantuan benih ikan lele pada program *Okke Masse* (One Kolam One Keluarga Masyarakat Sejahtera) berdasarkan pada data yang diperoleh dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang di keluarkan oleh Dinas Sosial Kabupaten Jember dan data Balita Stunting yang diperoleh dari Dinas Kesehatan Kabupaten Jember.

### **Sasaran Strategis 2: Meningkatnya Produksi Olahan Perikanan yang Bersertifikat**

#### a. Presentase Produk Olahan Perikanan Bersertifikat

Hasil evaluasi kinerja atas rekapitulasi capaian kinerja pada tabel 3.5 menunjukkan sasaran Meningkatnya Produksi Olahan Perikanan yang Bersertifikat mencapai predikat sangat tinggi yaitu mempunyai nilai capaian rata – rata 99 %,

- Beberapa hal yang menjadi permasalahan pada pada pencapaian target Persentase produk olahan perikanan yang bersertifikat yaitu:
  - a) Kurangnya pengetahuan dan kesadaran pelaku usaha terhadap pentingnya sertifikasi produk dan prosedur dan persyaratan sertifikasi.
  - b) Kurangnya pengetahuan tentang diversifikasi produk olahan ikan dan bahan baku, dan belum semua hasil olahan dikemas secara higienis dan menarik.
- Faktor pendorong keberhasilan adalah dukungan dan peran serta Dinas Perikanan dalam mendukung pelaku usaha dengan melakukan bimbingan dan pelatihan terkait masalah diverifikasi olahan dan penerapan sanitasi dan higienis pada produk olahan ikan serta memberikan penjelasan



- kepada pelaku usaha perikanan terhadap fasilitasi pengolahan ikan untuk memperoleh perijinan SKP, P-IRT dan sertifikat halal.
- Solusi terhadap kendala kedepan adalah peningkatan kapasitas pelaku usaha dengan
    - a) Memberikan pelatihan dan pendampingan teknis tentang proses sertifikasi dan standar kualitas.
    - b) Memberikan Pembinaan dan Pelatihan Pasca Panen bagi UMKM dan Kelompok Pengolah Pemasar Produk Perikanan sebanyak 34 Unit usaha dan dilakukan 3 kali Kegiatan.
    - c) Melaksanakan Program Gemarikan untuk Meningkatkan Konsumsi Ikan dan Meningkatkan Produksi Olahan Perikanan. Event Gerakan Masyarakat Makan Ikan (Gemarikan) ini merupakan salah satu upaya pemkab jember untuk meningkatkan asupan gizi masyarakat terutama untuk mencegah terjadinya stunting pada anak khususnya ibu hamil. Dalam Kegiatan ini Dinas Perikanan Kabupaten Jember juga membagikan olahan Kudapan Anak berbahan dasar ikan dan goodie bag berupa olahan ikan.
  - Rencana perbaikan kedepan adalah dengan:
    - a) Monitoring dan evaluasi berkala dengan melakukan pengawasan rutin terhadap produk olahan perikanan bersertifikat untuk menjaga kualitas.
    - b) Kemitraan strategis dengan pihak swasta dan akademisi dalam mengembangkan produk yang inovatif dan bersertifikat untuk membantu pemasaran produk bersertifikat.
  - Inovasi dan / atau program kolaborasi dengan stakeholder antara lain dengan
    - a) Integrasi program dengan sektor pendidikan, melibatkan anak-anak usia dini dengan mengedukasi tentang pentingnya mengkonsumsi ikan.
    - b) Integrasi dengan sektor kesehatan dan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana dengan melakukan promosi gemarikan, memberikan makanan sehat berupa aneka olahan ikan dan sosialisasi tentang resiko stunting yang merupakan salah satu



gangguan tumbuh kembang yang menyebabkan anak memiliki perawakan pendek

- c) Menyelenggarakan acara seperti lomba masak ikan, penyuluhan, atau bazar produk olahan ikan di tingkat kelurahan dan kecamatan.

Dengan langkah-langkah ini, produksi olahan perikanan bersertifikat diharapkan dapat meningkat secara signifikan, mendorong daya saing produk lokal, dan memberikan manfaat ekonomi yang lebih besar bagi pelaku usaha dan masyarakat.

### F. REALISASI ANGGARAN

Dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perikanan, pada tahun anggaran 2024 didukung dengan anggaran sebesar Rp 9.866.537.304 yang bersumber dari APBD Kabupaten Jember.

Secara ringkas realisasi anggaran Belanja Operasional dan Belanja Modal sebagai berikut:

1. Belanja Operasional sebesar Rp. 9.866.537.304 terealisasi sebesar Rp. 8.477.267.467,- (86%)
2. Belanja Modal sebesar Rp 0 terealisasi sebesar Rp. 0,- (0%)

**Tabel 3.9**  
**Realisasi Anggaran Dinas Perikanan Tahun 2024**

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran (Rp,-)	Realisasi (Rp,-)	% Realisasi
1	Program penunjang Urusan pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Rp 7.615.994.704	Rp 6.287.757.267	83%
1.1	Kegiatan Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah	Rp 3.387.000	Rp 420.000	12%
	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp 564.500	Rp 420.000	12%
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA -SKPD	Rp 564.500	Rp 0	0%
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA -SKPD	Rp 564.500	Rp 0	0%
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Rp 564.500	Rp 0	0%



No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran (Rp,-)	Realisasi (Rp,-)	% Realisasi
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Rp 564.500	Rp 0	0%
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Rp 564.500	Rp 0	0%
1.2	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat daerah	Rp 7.000.184.908	Rp 5.712.235.584	84%
	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp 5.833.863.408	Rp 4.600.185.089	79%
	Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Rp 1.165.757.000	Rp 1.112.050.495	95%
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Rp 564.500	Rp 0	0%
1.3	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Rp 580.000	Rp 250.000	43%
	Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Rp 580.000	Rp 250.000	43%
1.4	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat daerah	Rp. 250.499.500	Rp 232.833.752	93%
	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp1.898.000	Rp 1.754.600	92%
	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp 18.298.300	Rp 10.926.400	60%
	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Rp 4.064.900	Rp 3.233.500	80%
	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp 89.860.800	Rp 83.533.460	93%
	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp 2.850.500	Rp 1.630.000	57%
	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp 133.527.000	Rp 131.755.792	99%
1.5	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 230.233.296	Rp 221.019.592	96%
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp 4.200.000	Rp 3.350.000	80%
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp. 226.033.296	Rp 217.669.952	96%
1.5	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 131.110.000	Rp 120.997.979	92%
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa	Rp 37.000.000	Rp 36.104.374	98%



No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran (Rp,-)	Realisasi (Rp,-)	% Realisasi
	Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp 69.860.000	Rp 61.312.470	88%
	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp 15.000.000	Rp 14.875.000	99%
	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rp 4.250.000	Rp 3.781.135	89%
	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp 5.000.000	Rp 4.925.000	99%
2	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Rp. 157.721.796	Rp 140.577.200	89%
2.1	Kegiatan Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 157.721.796	Rp 140.577.200	89%
	Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Rp. 157.721.796	Rp 140.577.200	89%
3	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Rp 292.820.804	Rp 279.945.000	96%
3.1	Kegiatan Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Rp 25.000.000	Rp 25.000.000	100%
	Sub Kegiatan Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Rp 25.000.000	Rp 25.000.000	100%
3.2	Kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Rp 267.820.804	Rp 254.945.000	95%
	Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rp 207.745.804	Rp 198.125.000	95%
	Sub Kegiatan Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rp 60.075.000	Rp 56.820.000	95%
4	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Rp 1.800.000.000	Rp. 1768.988.000	98%



No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran (Rp,-)	Realisasi (Rp,-)	% Realisasi
4.1	Kegiatan Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi usaha Pengolahan dan Pemasaran skala Mikro dan Kecil	Rp 1.800.000.000	Rp. 1768.988.000	98%
	Sub Kegiatan Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk konsumsi ikan untuk konsumsi dan usaha pengolahan dalam 1 (satu) daerah Kab/Kita	Rp 1.800.000.000	Rp. 1768.988.000	98%
	<b>JUMLAH</b>	<b>Rp 9.866.537.304</b>	<b>Rp 8.477.267.467</b>	<b>86%</b>

Sumber Data : Laporan Realisasi Anggaran Dinas Perikanan Tahun 2024



## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Laporan Kinerja Dinas Perikanan ini memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan Dinas Perikanan sebagai jabaran dari visi, misi dan strategi instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Dari hasil evaluasi terhadap kinerja Dinas Perikanan disimpulkan bahwa secara umum Dinas Perikanan telah memperlihatkan pencapaian kinerja yang signifikan atas sasaran-sasaran strategisnya. Dari sejumlah 3 Indikator yang diperjanjikan dalam PK 2024, sebanyak 3 indikator mencapai target dengan kategori Sangat Tinggi.

Faktor kunci pendukung keberhasilan tercapainya sasaran tahun 2024 adalah :

1. Perencanaan kinerja yang baik

Perencanaan merupakan pondasi utama dalam penilaian kinerja instansi. Dengan memperhatikan komponen – komponen yang ada pada perencanaan kinerja dan diimplementasikan secara optimal akan berdampak pada pencapaian kinerja instansi yang lebih baik.

2. Integrasi antar bidang

Capaian kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jember tidak lepas dari peran masing – masing bidang (Bidang Sekretariat, Bidang Perikanan Tangkap dan Sumberdaya Perikanan dan Bidang Perikanan Budidaya dan Pasca Panen). Adanya sinergitas antar bidang inilah sehingga capaian program / kegiatan pada Dinas Perikanan Kabupaten Jember dapat terlaksana dengan baik.

3. Optimalisasi Sumber Daya

Memaksimalkan segala sumber daya yang ada dalam pelaksanaan tugas merupakan upaya yang dilakukan dalam keberhasilan tercapainya sasaran pada tahun 2024.



#### 4. Monitoring dan Evaluasi

Melakukan pemantauan atau monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan merupakan hal yang penting untuk memperbaiki implementasi jika terjadi hambatan/kendala.

Rekomendasi rencana aksi yang lebih efektif untuk perbaikan kedepan sebagai berikut :

##### 1. Identifikasi Tujuan dan Sasaran Program

Merumuskan tujuan dan sasaran yang jelas serta terukur untuk pencapaian hasil yang baik.

##### 2. Penentuan Strategi

Penentuan strategi dalam implementasi pelaksanaan kegiatan merupakan hal yang penting untuk mencapai hasil yang maksimal.

Demikian Laporan Kinerja Dinas Perikanan yang menggambarkan capaian kinerja tiap-tiap tujuan dan sasaran pada tahun 2024 sebagai bentuk pertanggungjawaban, bahan evaluasi dan penyusunan rencana kegiatan tahun 2025.

